

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.2. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. prestasi yang dimaksud adalah efektifitas operasional organisasi baik dari segi manajerial maupun ekonomis. Prestasi organisasi merupakan tampilan wajah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Dengan kinerja, organisasi dapat mengetahui sampai peringkat berapa prestasi keberhasilan atau bahkan kegagalannya. Informasi tentang kinerja organisasi atau perusahaan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya.

Penilaian kinerja perusahaan suatu hal yang penting dalam proses perencanaan, pengendalian, dan proses transaksional seperti merger, akuisisi, dan emisi saham. Melalui penilaian, perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangan yang tepat menentukan *phase out* terhadap unit-unit bisnis perusahaan yang tidak produktif menetapkan balas jasa internal dan menentukan harga saham secara wajar. Sebagai sebuah pedoman dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau balasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi.

Konsep kinerja (*performance*) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau *degree of accomplishment*. Hal ini berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dan ditingkatkan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa Rolson d'erre dari suatu organisasi ini adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan

untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya [11].

Hal yang sama juga disampaikan oleh sumber lain yang membahas tentang kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan sebuah aksi, bukan kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan merupakan hasil yang dapat pada saat itu juga. Pada dasarnya kinerja merupakan sesuatu hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbedadalam mengerjakan tugasnya. Kinerja tergantung pada kombinasi antara kemampuan usaha dan kesempatan yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa kinerja merupakan hasil kerja karyawan dalam bekerja untuk periode waktu tertentu dan penekanannya pada hasil kerja yang diselesaikan karyawan dalam periode waktu tertentu [12].

Ukuran kinerja perusahaan dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Perusahaan-perusahaan selama ini lebih banyak menggunakan pengukuran kinerja yang lebih baik menekankan pada aspek keuangan, yaitu yang sering disebut dengan pengukuran kinerja tradisional. Kinerja tradisional yang diukur hanyalah berkaitan dengan aspek keuangan. Sedangkan pengukuran kinerja lainnya seperti peningkatan kompetensi dan komitmen personal, peningkatan produktivitas dan *cost effectiveness* proses bisnis yang digunakan untuk melayani pelanggan selalu diabaikan oleh manajemen karena sulit dalam pengukurannya. Selama ini pengukuran kinerja perusahaan dilakukan melalui pendekatan tradisional yang menitik beratkan pada sisi keuangan seperti *gross profit*, *return equity*, *operating income* dan sebagainya [13].

Dalam penelitian ini menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) karena rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Penggunaan *Return On Asset* merupakan efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar *Return On Asset* maka semakin besar efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan sebaliknya [2].

Return On Asset (ROA) didapat dengan membagi laba bersih dengan total aktiva yaitu [2]:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.1)$$

Kinerja perusahaan merupakan gambaran posisi keuangan dan nilai perusahaan pada suatu periode tertentu yang diukur guna melihat seberapa baik suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya.

2.1.3. Corporate Governance

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan para investor. konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi paska krisis. *Good Corporate Governance* diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder* nya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara akurat dan tepat waktu [14].

Dalam sebuah forum *corporate governance* di Indonesia, *corporate governance* juga dikatakan sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemegang saham, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ektern lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. *Corporate governance* dijadikan sebagai suatu mekanisme oleh pemegang saham dan kreditor untuk mengendalikan tindakan menajer. Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal, yaitu struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, kompensasi eksekutif, dan mekanisme eksternal yaitu pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal [15].

Kerangka yang membangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham yaitu [14] :

Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan,

- a. Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur
- c. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
- d. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi,
- e. Hak untuk memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan.

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self trading*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris harus terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).

1. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholder*)

Kerangka yang membangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana ditentukan oleh undang – undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan serta kesinambungan usaha.

2. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*)

Kerangka yang membangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (Kantor akuntan Publik) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

3. Tanggungjawab dewan komisaris dan direksi (*the responsibilities of the board*)

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya [14].

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Sehubungan dengan itu, FCGI (*Forum for Corporate Governance Indonesia*) mengemukakan beberapa asa yang dianut Indonesia sebagai berikut [15]:

1. *Transparansi (Transperancy)*

Keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentinganlainnya berdasarkan asa kewajiban dan kesetaraan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan transparansi dalam lingkup kedudukan masing masing dan perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

3. *Akuntabilitas (Accountanbility)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk menciptakan kinerja yang berkesinambungan.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara berkesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.

5. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dari tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan *corporate governance* merupakan suatu aturan yang menjelaskan mengenai tata cara pengelolaan perusahaan. Penerapan *corporate governance* didalam perusahaan diyakini dapat mendorong terjadinya operasional yang baik. Dengan demikian kinerja perusahaan dapat terjadi secara maksimal.

Good Corporate Governance pada penelitian ini terdiri dari Jumlah Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional.

2.1.3.1. Jumlah Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, dimana seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan [14].

Menurut Tricker dalam beberapa tahun terakhir peran dan tanggung jawab komite audit telah berkembang dengan cakupan semakin luas. Pada kebanyakan kasus

di perusahaan terbuka, peranan komite audit berhubungan dengan tugas memberikan nasihat dan masukan terkait sistem pengendalian internal manajemen, pengawasan dan monitoring terhadap audit internal, komunikasi dengan KAP, memberikan laporan kepada dewan komisaris terhadap proses dan isu audit, melakukan review terhadap laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pemegang saham dan pihak lainnya yang berkepentingan, memberikan nasihat dari masukan tentang berbagai hal terkait akuntabilitas dewan komisaris, serta memastikan kepatuhan terhadap implementasi *corporate governance* sesuai dengan standar yang ditetapkan [15].

Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang meliputi :

- a. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan serta proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- c. Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan public untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan.
- d. Menelaah efektivitas pengendalian internal perusahaan.
- e. Menelaah tingkat keputusan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

Komite audit wajib melaporkan hasil penelaahannya kepada seluruh anggota dewan komisaris selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah laporan itu selesai dibuat. Komite audit wajib menyampaikan laporan aktivitasnya kepada dewan komisaris secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan [15].

Dalam melaksanakan tugasnya komite audit memerlukan acuan yang jelas serta tegas terutama untuk tujuan mengidentifikasi peranan dan tanggung jawab mereka, mendefinisikan cakupan otoritas yang dimiliki dan klarifikasi terhadap

frekuensi pertemuan. Lazimnya komite audit memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah pertemuan formal, wawancara, atau investigasi diperlukan dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Untuk kepentingan perusahaan, komite audit juga dapat menggali sehingga dapat memperoleh informasi dari karyawan perusahaan, namun dilakukan dengan sepengetahuan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Pada perusahaan terbuka di berbagai Negara maju, pimpinan yang bertanggung jawab terhadap fungsi pengendalian internal perusahaan memiliki jalur organisasi untuk pelaporan langsung kepada ketua komite audit. Selanjutnya, komite audit juga dapat meminta saran dan rekomendasi profesional dari pihak independen yang berada di luar perusahaan dalam upaya optimalisasi fungsi dan tanggung jawabnya [15].

Dalam penelitian ini jumlah komite audit diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut [14] :

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit} \quad (2.2)$$

2.1.3.2. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi adalah sekumpulan eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengawasan aktivitas presiden dan manajer tingkat atas perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mensupervisi bisnis dan kegiatan perusahaan. Sebagai tambahan dan mencoba untuk memastikan bahwa bisnis telah dikelola dengan maksud untuk melayani para pemegang saham. Para direktur yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasi dan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi hukum yang berlaku. Mereka tidak akan dapat mengawasi seluruh keputusan kerja, namun mereka dapat memaksa perusahaan memiliki proses yang akan memandu beberapa keputusan mengenai perilaku moral dan etis. Para direktur juga dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki sesuatu sistem pengendalian untuk mewakili kepentingan mereka. Dewan direksi secara rutin meninjau struktur perusahaan untuk memastikan apakah ia telah mendukung kinerja yang optimal sehingga dapat melayani kepentingan utama para pemegang saham dan memberikan nilai pemegang saham [16].

Pada kondisi perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris berasal dari pihak independen atau didominasi oleh komisaris independen, maka fokus aktivitas mereka terhadap aspek kepatuhan semakin besar. Hal ini terjadi terutama jika dewan

komisaris menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam menjalankan peran memberikan kontribusi terhadap formulasi strategi dan membuat kebijakan perusahaan. Dalam kasus ini maka aktivitas kinerja secara penuh dilegaskan kepada direksi atau pihak manajemen. Namun kondisi tersebut lazim ditemukan pada struktur governance dengan sistem dewan satu tingkat atau *unitary/ sing-tier board*. Pada sistem dewan dua tingkat atau *two-tier board*, dimana terdapat pemisahan yang tegas antara dewan komisaris dengan direksi/manajemen, terdapat pemisahan fungsi pengawasan dan pelaksanaan yang jelas. Dalam kaitan ini pihak direksi akan menjalankan operasionalisasi usaha perusahaan sehingga bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan, sementara dewan komisaris mengawasi segala aktivitas pencapaian kinerja dimaksud serta memastikan akuntabilitas.

Sekelompok dewan komisaris lainnya memiliki pemahaman bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas yang berhubungan dengan aspek kepatuhan dengan tetap memiliki komitmen dan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Dalam hal dewan komisaris melaksanakan peran mereka melalui fungsi pengarahaan (*directing*) terhadap perusahaan, menyakinkan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan, memahami potensi resiko serta menetapkan berbagai arahan untuk masa depan perusahaan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa peranan dewan komisaris berjalan seimbang antara aspek kepatuhan dan aspek kinerja dalam dikotomi *conformance/performance activities* [15].

Ukuran direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan cepat. Paling sedikit 20% dari anggota direksi harus merupakan direktur luar (*outside directors*) agar dapat meningkatkan efektivitas dari peranan manajemen dan transparansi dan pertimbangannya. Jumlah direktur luar harus sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai pengaruh atas keputusan-keputusan yang penting yang dicapai pada setiap rapat direksi. Direksi luar harus independen dari dewan komisaris dan pemegang saham pengendali dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka melakukan kewajiban secara tidak memihak atas nama perusahaan. Ukuran dewan direksi dapat dirumuskan sebagai berikut [16] :

$$\text{Ukuran dewan direksi} = \sum \text{Dewan direksi pada perusahaan} \quad (2.3)$$

2.1.3.3. Proporsi Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris Independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non pemegang saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris.

Syarat-syarat untuk menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau dengan komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Memahami peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
- d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari perusahaan tercatat yang bersangkutan [16].

Dalam hal memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris, keberadaan komisaris independen adalah sangat diperlukan. keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya [17].

Pemegang saham pengendali adalah pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih saham perusahaan atau yang memiliki kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengelolaan atau kebijakan perusahaan meskipun jumlah saham yang dimiliki kurang dari 20%. Dewan Komisaris wajib memberikan rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikan kepada seluruh anggota direksi perusahaan yang tercatat yang bersangkutan, selambat-lambatnya 7

hari kerja setelah Dewan Komisaris menerima laporan akhir hasil penelaahan komite audit dengan melampirkan hasil penelaahan tersebut .

Ukuran proporsi dewan komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut [16]:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \quad (2.4)$$

Dewan Komisaris memiliki tugas sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan strategis dalam perusahaan serta memberi nasehat kepada dewan direksi. Dalam penelitian ini menekankan pada komposisi keberadaan Komisaris Independen terhadap jumlah seluruh komisaris.

2.1.3.4. Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan telah menjadi inti dari teori modern perusahaan. Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki tujuan yang berbeda dalam hal memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer, maka manajer akan merasakan langsung akibat dari keputusan yang diambil sehingga tidak mungkin manajer bertindak oportunistik. Keberadaan manajerial memiliki latar belakang berbeda, pertama adalah pihak yang mewakili pemegang saham institusional, kedua adalah tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ketiga adalah pihak yang duduk di jajaran manajemen perusahaan karena memiliki saham perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga akan langsung memperoleh manfaat dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari keputusan yang keliru dan tidak sesuai harapan [16]. Semakin besar kepemilikan oleh manajerial di dalam perusahaan akan memaksa manajer untuk bekerja lebih giat dalam meningkatkan kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh dampak yang akan diterima atas kebijakan yang akan diambil. Baik buruk nya kebijakan dan hasil dari kebijakan akan dirasakan oleh manajer.

Manajer sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab, diharapkan dapat bertindak untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu kesejahteraan pemegang saham. Namun seringkali para manajer lebih mementingkan kesejahteraan pribadi. Hal ini lah yang akan menimbulkan konflik kepentingan. Dengan proporsi kepemilikan saham oleh manajer, berarti manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Sehingga konflik kepentingan tidak akan terjadi karena manajer juga akan menerima dampak dari setiap keputusan yang diambil [17].

Ukuran kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut [17]:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{saham dewan direksi dan komisaris}}{\text{Total saham beredar}} \quad (2.5)$$

Dari penjelasan diatas, bahwa kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan. Kepemilikan manajerial ini memiliki dampak baik bagi perusahaan dikarenakan mereka akan berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan dan meminimalisasikan terjadinya praktik manajemen laba. Mereka akan bertindak seperti investor yang diluar perusahaan yang ingin menerima informasi laporan keuangan yang benar adanya sehingga ini membuat investor dapat mengambil keputusannya. Persentase kepemilikan manajerial perlu juga dibatasi oleh perusahaan dikarenakan jika semakin tinggi persentasenya maka tidak menutup kemungkinan mereka mengabaikan pihak eksternal. Sehingga pihak eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer.

2.1.3.5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan asset manajemen. Tingkat Kepemilikan Institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor terhadap kinerja manajemen agar lebih maksimal yang disebabkan Kepemilikan Institusional memiliki kekuatan atau wewenang yang memungkinkan untuk mendukung atau menolak kinerja manajerial perusahaan sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistis

manajer. Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang oportunistis melalui pengawasan intensif.

Kepemilikan Institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional mayoritas mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan pemanfaatan diskresionari dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas yang baik pada laba yang dilaporkan. Adanya pengawasan investor institusional secara optimal terhadap kinerja manajer, maka manajer akan memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan dan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham [17].

Kepemilikan Institusional pada kebanyakan investor tidak mempunyai saham yang cukup untuk mempengaruhi manajemen perusahaan. Walaupun demikian, semakin banyak saham yang dibeli oleh investor institusional. Karena mereka mengontrol berbagai sumber daya, maka investor itu khususnya usaha dana yayasan dan dana pensiun dapat membeli saham dalam jumlah besar [16].

Investasi yang cukup besar oleh institusi, memberi keuntungan bagi institusi untuk membuat keputusan kinerja manajerial yang tidak baik, sehingga membuat institusional merasa tidak puas, akan berdampak pada penjualan saham oleh institusi. Kondisi ini tentu akan merugikan perusahaan karena modal akan berkurang.

Berikut adalah rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung struktur kepemilikan manajerial [17] :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\sum \text{saham institusional}}{\sum \text{saham keseluruhan}} \quad (2.6)$$

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan perbankan, konsumen, investasi dan institusi lainnya. Kepemilikan Institusional memiliki peran yang sangat penting dikarenakan rata – rata persentase investasinya cukup besar dengan adanya alokasi dana dari perusahaan untuk kegiatan investasi. Dalam hal ini membuat para pemilik perusahaan atau manajer berusaha dengan baik untuk menaikkan tingkat laba perusahaan yang

membuat investor institusi akan mendapat keuntungan atas investasi dan kemungkinan akan menaikkan kembali tingkat persentase kepemilikan saham perusahaan dan akan berdampak pada manajer untuk memberikan hasil yang terbaik dalam hal laporan keuangan yang dihasilkan.

2.1.4. Kualitas Laba

Pada dasarnya laporan laba rugi menggambarkan besarnya jumlah pendapatan dan biaya dalam satu periode sehingga merupakan informasi yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan kinerja perusahaan. Informasi tersebut dibutuhkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola perusahaan. Laporan laba rugi juga digunakan untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas dimasa yang akan datang. Laba dalam akuntansi adalah perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi dan dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Laba sering digunakan sebagai indikator dalam pengambilan keputusan investasi, informasi untuk pembagian dividen serta menentukan perstasi perusahaan menjadikan laba sebagai informasi penting yang diperhitungkan kebenarannya [18].

Telah dipahami bahwa pengukuran dan pengakuan laba membutuhkan estimasi dan interpretasi transaksi dan kejadian usaha. Analisis laba terdahulu menekankan bahwa laba akuntansi bukan jumlah yang unik, tetapi tergantung pada asumsi yang digunakan dan prinsip yang diaplikasikan. Kita telah memahami bahwa akuntansi akrual mencakup penyesuaian arus kas untuk mencerminkan konsep yang diterima umum, yaitu pendapatan dan beban yang terjadi. Analisis harus diarahkan pada asumsi dan aplikasi prinsip, serta penyesuaian yang layak untuk tujuan yang analis. Informasi pada akrual digunakan karena keunggulan kompetitif dan untuk membantu memahami kinerja perusahaan saat ini dan masa depan. Kita juga harus mempertimbangkan resiko akuntansi dan resiko audit pada saat menggunakan laba. Pengukuran kualitas laba menimbulkan kebutuhan untuk membandingkan laba antar perusahaan dan keinginan untuk mengakui perbedaan kualitas laba untuk tujuan penilaian [18].

Kualitas laba merupakan laba yang ada didalam laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Laba yang berkualitas merupakan laba yang mencerminkan kelanjutan laba di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan kondisi kas yang menunjukkan keadaan kinerja perusahaan yang sebenarnya .

Menentukan dan menjelaskan laba suatu usaha pada satu periode merupakan tujuan pertama, yakni laporan laba rugi. Pada konsepnya laba ditugaskan untuk menyediakan, baik mengukur perubahan kekayaan pemegang sahamnya selama periode maupun mengestimasi laba usaha sekarang sejauh mana perusahaan dapat menutupi biaya operasi dan menghasilkan pengembalian kepada pemegang saham. Dan tujuan kedua, yakni dengan indikator profitabilitas perusahaan sangat krusial bagi seorang analis karna mebantuu dalam mengestimasi potensi laba di masa depan [19].

Pengukuran kualitas laba menimbulkan kebutuhan untuk membandingkan laba antar perusahaan dan keinginan untuk mengakui perbedaan kualitas untuk tujuan penilaian. Tidak ada kesepakatan lengkap mengenai dasar kualitas laba. Terdapat tiga faktor yang biasanya diidentifikasi sebagai penentu kualitas laba, yaitu :

1. Prinsip akuntansi. Salah satu penentu kualitas laba adalah kebebasan manajemen dalam memilih prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kebebasan ini dapat bersifat agresif (optimis) atau konservatif.
2. Aplikasi akuntansi. Penentuan kualitas laba lainnya adalah kebebasan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Manajemen memiliki kebebasan terhadap jumlah laba yang dilaporkan melalui aplikasi prinsip akuntansi untuk menentukan pendapatan dan beban.
3. Resiko usaha. Penentu kualitas laba yang ketiga adalah hubungan antara laba dan resiko usaha. Hal ini mencakup dampak siklus dan kekuatan usaha lain terhadap tingkat, stabilitas, sumber, dan variabelitas laba [18].

Berikut adalah rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung kualitas laba [5]:

$$\text{Kualitas Laba} = \frac{\text{Arus kas operasi}}{EBIT} \quad (2.7)$$

Rasio kualitas laba menunjukkan varians antara arus kas operasi dengan laba sebelum bunga dan pajak, makin tinggi rasio maka makin tinggi kualitas laba karena makin besar bagian laba operasi yang direalisasikan dalam bentuk kas.

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan dapat ditentukan dari jumlah aset perusahaan, laba perusahaan dan kapasitas pasar. Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata aktiva.

Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan yang berbeda. Pertama ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Walaupun mereka mempunyai akses, biaya peluncuran (*flotation cost*) dari penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentu harga sedemikian rupa agar investor memperoleh hasil yang memberikan return yang lebih tinggi secara signifikan. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk utang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang terlibat, semakin besar kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesuai preferensi kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standart uang. Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Akhirnya ukuran diikuti oleh karakteristik lain yang struktur keuangan, yaitu perusahaan kecil tidak memiliki staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan dan tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi suatu sistem informasi manajemen [20].

Ukuran Perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkat perusahaan adalah:

1. Tenaga kerja

Merupakan jumlah pegawai tetap dan honor yang terdaftar atau bekerja diperusahaan pada suatu saat tertentu.

2. Tingkat penjualan

Merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, misalnya 1 tahun. Total hutang ditambah dengan nilai pasar saham biaya pada perusahaan yang merupakan jumlah hutang dan nilai pasar biasa perusahaan pada saat/suatu tanggal tertentu.

3. Total Aktiva (*assets*)

Merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Semakin besar total aktiva perusahaan, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, aktiva laba yang diperoleh dan kapasitas pasar perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga kebijakan yang diambil memiliki dampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibanding perusahaan kecil.

Berikut adalah rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung ukuran perusahaan [20].

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln (\text{Total Aset}) \quad (2.8)$$

2.1.6. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karna pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya juga bisa berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan [8].

Perhitungan pajak tangguhan adalah perhitungan pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berdasarkan “konsekuensi PPh yang akan datang” yang timbul akibat adanya perbedaan basis nilai aset atau liabilitas antara perhitungan menurut akuntansi dan menurut pajak. Pajak tangguhan (*deferred tax*) terdiri dari [21]:

1. Liabilitas pajak (*deferred tax liabilities*) yaitu jumlah PPh yang terutang untuk periode mendatang (*payable*) sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*future taxable amount*) dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi.
2. Aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*) yaitu jumlah PPh yang akan terpulihkan pada periode mendatang (*recoverable*) sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang boleh dikurangkan (*future deductible amount*) dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang (mengurangi laba fiskal dimasa yang akan datang) pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai aset tercatat liabilitas dilunasi dan sisa kompensasi kerugian apabila laba fiskal dimasa datang memadai untuk dikompensasi.

Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan pajak penghasilan terutang dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu [21]:

- a. Perbedaan permanen atau tetap
Perbedaan ini terjadi apabila terdapat yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam akuntansi secara komersial yang diatur dalam Standart Akuntansi Keuangan (SAK). Namun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, penghasilan atau biaya tersebut bukan merupakan penghasilan atau biaya. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen.
- b. Perbedaan temporer atau waktu
Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan waktu untuk penghasilan atau biaya secara komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya saja menurut fiskal metode penyusutan aktiva tetap berwujud yang diakui adalah metode garis lurus dan saldo menurun berganda.

Selisih dari perbedaan pengakuan waktu antara laba akuntansi komersial dan laba akuntansi fiskal akan mengakibatkan koreksi fiskal berupa :

- a. Koreksi fiskal positif
Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan adanya penambahan penghasilan.

b. Koreksi fiskal negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar, maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum harus diakui sebagai suatu kewajiban. Kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengobanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari kewajiban masa kini, suatu entitas untuk menyerahkan aset kepada entitas-entitas lainnya sebagai akibat kejadian masa lalu. Sebagai contoh perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. Jika beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian, selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Pengakuan kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat pelunasan kewajiban pajak [22].

Apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dapat dianggap sebagai suatu aset. Aset didefinisikan sebagai suatu kemungkinan akan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian dimasa lalu. Misalnya rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi berdasarkan peraturan perpajakan atau kemungkinan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang akan mengurangi beban pajak, maka dapat diakui sebagai suatu aset pajak tangguhan. Pengakuan aset tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pemulihan aset mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi lebih kecil sebagai akibat pemulihan aset yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

Besar pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalihkan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal atau rugi fiskal yang dapat dikompensasi dengan tariff pajak yang berlaku.

Namun perlu diingat, tidak semua beda waktu dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Semua harus dengan ketentuan perpajakan [8].

Besarnya pajak tangguhan (*deffered tax*) dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan pada tahun berjalan. Perhitungan untuk pajak tangguhan yang dijadikan ukuran adalah dengan menyesuaikan PSAK No.46 tentang pajak penghasilan. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung pajak tangguhan [22].

$$\text{Beban Pajak Tangguhan} = \frac{\text{beban pajak tangguhan}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \quad (2.9)$$

2.1.7. *Tax To Book Ratio*

Tax to book ratio merupakan perbandingan antara rasio pajak (*taxable income*) terhadap laba akuntansi (*book income*). Dimana laba akuntansi disusun berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk penghasilan kena pajak disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. *Tax to book ratio* merupakan salah satu dari sekian banyak rasio yang digunakan dalam melihat besaran pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam satu periode fiskal dengan laba akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) seluruh komponen yang termasuk kedalam pendapatan atau penjualan dapat ditambahkan serta diakui. Hal serupa juga terjadi dalam komponen beban usaha menurut Standar akuntansi keuangan. Seluruh beban usaha dan operasi yang berhubungan dengan usaha dapat dimasukan sebagai pengurang dan diakui [23].

Sementara itu dasar penghitungan penghasilan kena pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bukan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Sehingga dalam pembuatan laporan keuangan tidak perlu melakukan dua kali pembukuan berdasarkan kedua tujuan pelaporan tersebut. Dengan kata lain perusahaan harus melakukan penyesuaian dalam menghitung penghasilan kena pajak. penyesuaian yang dapat dilakukan berupa rekonsiliasi fiskal. Dimana rekonsiliasi fiskal terbagi atas dua bagian yaitu : koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif terjadi saat pendanaan menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Sedangkan koreksi negatif terjadi pada saat pendapatan

menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi. Terjadinya koreksi positif dimana laba fiskal bertambah yang berarti penghasilan kena pajak akan semakin besar dibandingkan dengan laba akuntansi, sehingga pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin besar. Sementara itu koreksi fiskal negatif terjadi pada saat laba fiskal berkurang dimana pajak yang dikenakan kecil. Sehingga jumlah pembayaran pajak yang akan dibayarkan perusahaan akan semakin kecil.

Rekonsiliasi fiskal menjelaskan adanya penerimaan yang tidak merupakan objek pajak dan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan terhadap penghasilan. Penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut [24]:

- a. Pendapatan deviden, bunga royalti, sewa, hadiah, penghargaan dan imbalan jasa tertentu yang sudah dikenakan pajak final atau sudah dipotong pada saat terjadi transaksi sehingga tidak terjadi dua kali pengenaan pajak terhadap satu objek penghasilan.
- b. Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.
- c. Jumlah imbalan yang melebihi kewajiban yang diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- d. Sanksi perpajakan berupa denda, bunga dan beban yang berkaitan dengan jaman yang melebihi dari tarif normative yang telah ditetapkan serta tidak memiliki dokumen yang sah.
- e. Pajak penghasilan dan lain sebagainya.

Berikut adalah rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung *tax to book ratio* [9].

$$\text{Tax to book ratio} = \frac{Tl_{it}}{PTBI_{it}} \quad (2.10)$$

Keterangan :

Tl_{it} = laba fiskal atau laba kena pajak pada perusahaan i tahun t

$PTBI_{it}$ = Laba akuntansi atau laba sebelum pajak pada perusahaan i tahun t

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *tax to book ratio* merupakan perbandingan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Adapun review dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Anas Ainur Rachmad (2013) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh penerapan *corporate governance* berbasis karakteristik manajerial pada kinerja perusahaan manufaktur. Variabel independen yaitu ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan institusional, proporsi kepemilikan manajerial dan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan pada kinerja perusahaan sedangkan komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara simultan komite audit, ukuran dewan direksi, dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan institusional dan proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [1].
2. I made Dwi Harmana dan Ketut alit Suardana (2014) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen yaitu pajak tangguhan, *tax to book ratio* dan variabel dependen adalah kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2011 dengan populasi sebanyak 127 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sebanyak 33 perusahaan sampel. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan *tax to book ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara simultan diperoleh bahwa pajak tangguhan dan *tax to book ratio* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [9].

3. Putu Ayu Winda dan Adi Puteri (2013) melakukan penelitian dengan judul, karakteristik *good corporate governance* dan kinerja perusahaan manufaktur. Variabel independen jumlah direksi, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, keberadaan komite nominasi dan remunerasi, keberadaan komite manajemen resiko, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan variabel dependen adalah kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011 dengan populasi 144 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sebanyak 120 perusahaan sampel. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa jumlah direksi, proporsi komisaris independen dan keberadaan komite manajemen resiko berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan jumlah komite audit keberadaan komite, nominasi dan remunerasi, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara simultan jumlah direksi, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, keberadaan komite nominasi dan remunerasi, keberadaan komite manajemen resiko, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [6].
4. Deby Anastasia Meilic Theacin dan I Gde Suparta Wisadha (2014) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh *good corporate governance*, kualitas laba dan ukuran perusahaan pada kinerja perusahaan. Variabel independen yaitu jumlah komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, ukuran perusahaan dan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sebanyak 36 perusahaan sampel. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan jumlah komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

perusahaan. Secara Simultan jumlah komite audit, ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [5].

5. Elyzabet I. Marpaung dan Lauw Tjun Tjun(2016) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen yaitu pajak tangguhan *tax to book ratio* dan variabel dependen adalah kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013 dengan populasi 131 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sebanyak 15 perusahaan sampel. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa pajak tangguhan dan *tax to book ratio* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara simultan diperoleh bahwa pajak tangguhan dan *tax to book ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [10].
6. Ajeng Asmi Mahaputeri dan I.Kt.Yadnyana (2014) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh struktur kepemilikan, kebijakan pendanaan dan ukuran perusahaan pada kinerja perusahaan. Variabel independen yaitu struktur kepemilikan, kebijakan pendanaan, ukuran perusahaan dan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012 dengan populasi sebanyak 50 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sebanyak 10 perusahaan sampel. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan pada kinerja perusahaan, sedangkan kebijakan pendanaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara simultan diperoleh bahwa struktur kepemilikan, kebijakan pendanaan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [7].

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu (Theoretical Mapping)

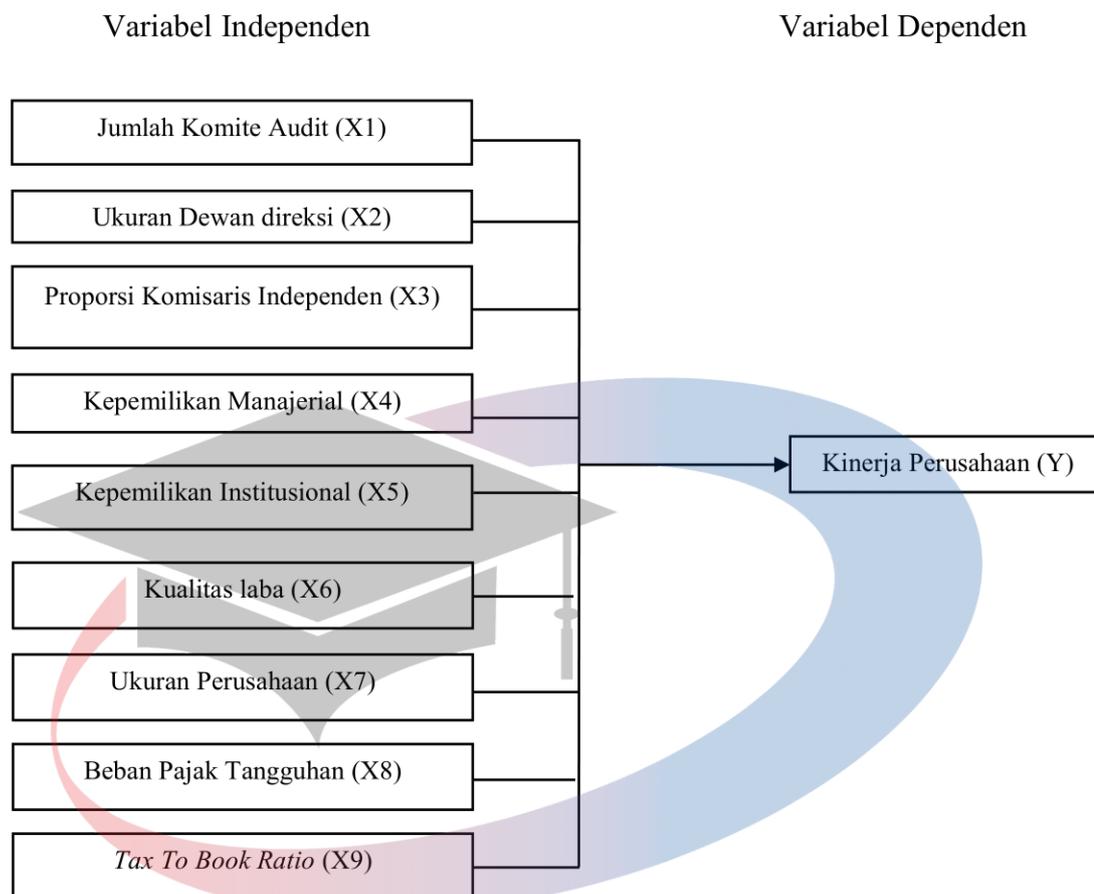
Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Anas Ainur Rachmad (2013)	Pengaruh penerapan <i>corporate governance</i> berbasis karakteristik manajerial pada kinerja perusahaan manufaktur	<u>Variabel independen</u> : ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, <u>Variabel dependen</u> : kinerja perusahaan.	<u>Secara simultan</u> : Diperoleh bahwa komponen <i>corporate governance</i> meliputi dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. <u>Secara Parsial</u> : Diperoleh bahwa dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan komite audit, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
I Made Dwi Harmawan dan Ketut Alit Suardana (2014)	Pengaruh pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> terhadap kinerja perusahaan.	<u>variabel independen</u> : pajak tangguhan, <i>tax to book ratio</i> <u>variabel dependen</u> : kinerja perusahaan	<u>Secara simultan</u> : Diperoleh bahwa pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. <u>Secara parsial</u> : Diperoleh bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan <i>tax to book ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Putu Ayu Winda dan Adi Puteri (2013)	Karakteristik <i>good corporate governance</i> dan kinerja perusahaan manufaktur	<u>Variabel independen</u> : jumlah direksi, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, keberadaan komite nominasi dan remunerasi, keberadaan komite manajemen resiko, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. <u>Variabel dependen</u> : kinerja perusahaan	<u>Secara simultan</u> : Diperoleh bahwa jumlah direksi, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, keberadaan komite nominasi dan remunerasi, keberadaan komite manajemen resiko, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. <u>Secara parsial</u> : Diperoleh bahwa jumlah direksi, proporsi komisaris independen dan keberadaan komite manajemen resiko berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan jumlah komite audit, keberadaan komite nominasi dan remunerasi dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Deby Anastasia Meilic dan I Gde Suparta Wisadha (2014)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> , kualitas laba, dan ukuran perusahaan pada kinerja perusahaan	<u>Variabel independen:</u> jumlah komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, ukuran perusahaan <u>Variabel dependen:</u> kinerja perusahaan	<u>Secara simultan :</u> Diperoleh bahwa jumlah komite audit, ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. <u>Secara parsial :</u> Diperoleh bahwa ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan jumlah komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Elyzabet I. Marpaung dan Lauw Tjun Tjun (2016)	Pengaruh pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> terhadap kinerja perusahaan	<u>Variabel independen :</u> Pajak Tangguhan, <i>tax to book ratio</i> <u>Variabel dependen :</u> Kinerja perusahaan	<u>Secara simultan :</u> Diperoleh bahwa pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. <u>Secara parsial :</u> Pajak tangguhan dan <i>tax to book ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Ajeng Asmi Mahaputeri dan I.Kt. Yadnyana (2014)	Pengaruh struktur kepemilikan, kebijakan pendanaa dan ukuran perusahaan pada kinerja perusahaan	<u>Variabel independen :</u> struktur kepemilikan, kebijakan pendanaan, ukuran perusahaan <u>Variabel dependen :</u> kinerja perusahaan.	<u>Secara simultan :</u> Diperoleh bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan pendanaan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. <u>Secara parsial :</u> Diperoleh bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan pada kinerja perusahaan, sedangkan kebijakan pendanaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian teoritis diatas untuk menggambarkan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen maka penulis menyusun kerangka konsep seperti berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan taksiran, dugaan atau teori yang sifatnya masih sementara, dan masih perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya.

a. Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan [14]. Keberadaan anggota komite audit berperan untuk mengawasi manajemen agar mengungkapkan informasi laporan keuangan secara lengkap dan jelas. Maka semakin banyak jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan komite audit

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan [25]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

b. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan direksi adalah sekumpulan eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengawasan aktivitas presiden dan menajer tingkat atas perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab untuk mensupervisi bisnis dan kegiatan perusahaan. Ukuran direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan cepat. Perusahaan harus memiliki komposisi dewan direksi sebesar 20% dari anggota direksi yang berada diperusahaan. Hal tersebut dapat meningkatkan pencapaian atas kinerja perusahaan yang ingin dicapai. Teori tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [5]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

c. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris [16]. Didalam suatu perusahaan dengan banyaknya komisaris independen, pengendalian dan pengawasan terhadap keputusan yang diambil dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Teori tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [6]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

d. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer, maka manajer akan merasakan langsung akibat dari keputusan yang diambil sehingga tidak mungkin manajer bertindak oportunistik [16]. Saham yang dimiliki manajemen akan meningkatkan motivasi kerja untuk mencapai tujuan sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan yang ingin dicapai. Teori tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [5]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

e. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi atas nama individu dan perusahaan. Ketika abad ke-21 terungkap perusahaan ini akan mengelolah lebih banyak dana untuk individu, dana pensiun dan dana yayasan [26]. Kehadiran investor institusional atau kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan atas pengelolaan operasional perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Ketika operasional perusahaan dapat berjalan dengan kepentingan bersama dan telah diawasi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Teori tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [7]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

f. Pengaruh Kualitas Laba terhadap kinerja Perusahaan

Kualitas laba merupakan laba yang ada didalam laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Pada dasarnya laporan laba rugi menggambarkan besarnya jumlah pendapatan dan biaya dalam satu periode sehingga merupakan informasi yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan kinerja perusahaan dan juga digunakan untuk memperkirakan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas dimasa yang akan datang. Informasi tersebut dibutuhkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola perusahaan. [18]. Kualitas laba akan mempengaruhi investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan yang berguna untuk mendorong kelangsungan hidup suatu perusahaan. Semakin tinggi kualitas laba perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Teori tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa kualitas laba berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [5]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Kualitas laba berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

g. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan

Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, rata-rata aktiva dan kapasitas pasar. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham [27]. Perusahaan besar yang sudah mapan akan lebih mudah memperoleh modal dipasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. Teori tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [5]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

h. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Perusahaan

Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karna pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya juga bisa berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan [8]. Dalam hal ini manajemen perusahaan harus mampu melakukan

manajemen pajak tangguhan dengan baik sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Teori tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [9]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₈ : Pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

i. Pengaruh *Tax To Book Ratio* terhadap Kinerja Perusahaan

Tax to book ratio merupakan perbandingan antara rasio pajak (*taxable income*) terhadap laba akuntansi (*book income*). *Tax to book ratio* merupakan salah satu dari sekian banyak rasio yang digunakan dalam melihat besaran pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam satu periode fiskal. Kaitan *tax to book ratio* dengan kinerja perusahaan pihak manajemen perusahaan biasanya cenderung memaksimalkan perolehan jumlah laba akuntansi. Maka hal tersebut mengidentifikasi bahwa kinerja perusahaan yang dicapai pada periode tersebut maksimal. Namun hal tersebut tidak dilakukan dalam hal pembayaran pajak. Biasanya pihak manajemen meminimalkan laba untuk pembayaran pajak semakin kecil. Hal ini berdampak pada penghematan pembayaran pajak. Maka hal tersebut mengidentifikasi bahwa kinerja perusahaan yang dicapai pada periode tersebut mengalami penurunan [24]. Dalam hal ini manajemen perusahaan harus memperhatikan besaran pajak yang harus dibayar perusahaan telah sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). *Tax to book ratio* yang sesuai berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Teori tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa *tax to book ratio* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan [9]. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₉ : *Tax to book ratio* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan